

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN LAMONGAN

Denny Iswanto¹

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Wijaya Putra
Jl. Pd. Benowo Indah No. 1-3 Kota Surabaya
Email: dennyiswanto@uwp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Lamongan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan tantangan dan strategi dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan, serta mengurangi stigma terhadap individu yang hidup dengan HIV/AIDS. Intervensi dilakukan dengan melacak kasus HIV/AIDS, melakukan promosi kesehatan yang menargetkan remaja, pekerja, dan penghuni lapas. Dalam upaya pencegahan, dilakukan penyuluhan dan inovasi layanan keliling. Sarana prasarana yang tersedia meliputi rumah sakit dan Puskesmas untuk melayani ODHA. Salah satu tantangan yang masih ada adalah kurangnya peran masyarakat dalam membantu penanggulangan, yang dipengaruhi oleh stigma negatif terhadap ODHA. Sistem informasi dan pelaporan data serta akses terhadap layanan kesehatan sudah tersedia. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah membantu dalam mengawasi kondisi ODHA. Temuan ini memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan saat ini dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan guna memperkuat respons terhadap pandemi HIV/AIDS di tingkat daerah.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Penyakit Menular Seksual; HIV/AIDS

ABSTRACT

This research aims to explore the implementation of HIV/AIDS prevention policies in Lamongan Regency. This study uses a qualitative approach with secondary data analysis techniques. The research results reveal challenges and strategies in implementing policies, including efforts to increase public awareness, access to health services, and reduce stigma towards individuals living with HIV/AIDS. Interventions are carried out by tracking HIV/AIDS cases, carrying out health promotions targeting teenagers, workers and prison inmates. In prevention efforts, outreach and mobile service innovations are carried out. The available infrastructure includes hospitals and health centers to serve PLWHA. One of the challenges that still exists is the lack of community role in helping with the response, which is influenced by negative stigma towards PLWHA. Information systems and data reporting as well as access to health services are already available. Guidance and supervision carried out by the government helps in monitoring the condition of PLWHA. These findings provide insight into the effectiveness of current policies and provide recommendations for future improvements to strengthen the response to the HIV/AIDS pandemic at the regional level.

Keywords: Policy Implementation, Sexually Transmitted Diseases; HIV/AIDS

PENDAHULUAN

Masalah kesehatan menjadi isu krusial global, khususnya untuk negara-negara dunia ketiga (Iswanto, 2023). Banyak negara menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan kesehatan yang memadai dan merata bagi seluruh penduduknya. Berbagai penyakit baik Penyakit menular maupun penyakit tidak menular merupakan aspek yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan organisasi kesehatan. Selain itu, akses terhadap obat-obatan, fasilitas medis, dan tenaga kesehatan yang berkualitas menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan standar kesehatan global (Pane & Iskandar, 2023). Dukungan dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional, sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

Salah satu isu global di sektor kesehatan adalah penyakit menular seksual (PMS). Penyakit ini mencakup berbagai kondisi seperti sifilis, gonore, hepatitis B dan HIV/AIDS. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sedangkan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV (Rahman et al., 2021).

Penyakit menular seksual menjadi perhatian karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan masyarakat, termasuk penyebaran yang cepat dan dampak jangka panjang terhadap individu dan komunitas (Pakpahan, 2021; Widiyaningsih & Suharyanta, 2020). Upaya pencegahan, edukasi, dan akses terhadap layanan kesehatan yang tepat sangat penting dalam menanggulangi penyebaran PMS dan meningkatkan kesehatan seksual global secara keseluruhan.

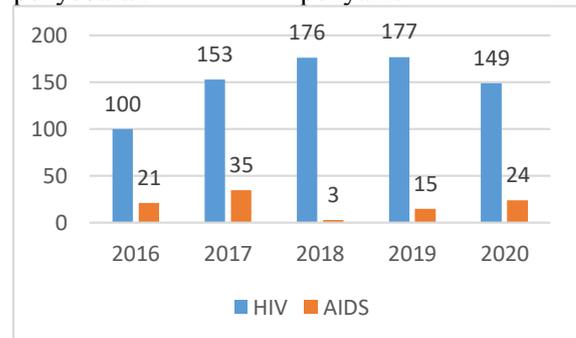
Hal ini sesuai dengan tujuan Pembangunan berkelanjutan, dimana terdapat prinsip inti dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan respons terhadap AIDS, adalah bahwa tidak seorang pun boleh tertinggal (Gunawan et al., 2021). *United Nations on HIV/AIDS* (UNAIDS), berupaya untuk mencapai seluruh agenda SDG, yang mencakup 10 SDG yang secara khusus relevan dengan respons terhadap AIDS diantaranya mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, memastikan kehidupan yang sehat,

menjamin pendidikan yang berkualitas, mencapai kesetaraan gender, mengurangi kesenjangan, menjadikan kota aman dan Tangguh, mendorong terciptanya masyarakat yang damai dan inklusif.

Kasus HIV/AIDS ini muncul di Indonesia pada tahun 1987 dan berkembang sampai saat ini (Riawati et al., 2024). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 16.410 kasus AIDS baru di Indonesia sepanjang 2023. Kasus AIDS baru paling banyak ditemukan di Jawa Barat, yakni 2.575 kasus atau 16% dari total kasus baru nasional. Kasus baru terbanyak kedua adalah di Jawa Timur (2.432 kasus), dan Jawa Tengah (2.432 kasus) (Muhammad, 2024).

Mengatasi masalah peningkatan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS melaksanakan berbagai Upaya mulai dari preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam mengatasi masalah ini. Dalam kebijakan tersebut Upaya dilakukan dengan melakukan pelacakan, promosi Kesehatan, pencegahan penularan, pelayanan, peran serta masyarakat, informasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta penyediaan sarana prasarana.

Salah satu daerah di Jawa Timur dengan perkembangan kasus HIV/AIDS adalah Kabupaten Lamongan. Meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS di wilayah ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, perilaku berisiko, dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan, turut berkontribusi terhadap penyebaran penyakit ini.



Grafik 1. Perkembangan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Lamongan

Sumber: (Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2021)

Diagram grafik di atas menunjukkan bahwa temuan kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2016 hingga 2020 cenderung fluktuatif. Terjadinya peningkatan temuan penderita HIV di tahun 2016 hingga 2019 disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan penularan HIV sehingga penyebaran sulit dicegah. Sedangkan di tahun 2020 HIV positif menurun dikarenakan pelacakan kasus baru sempat terhambat karena adanya pandemi Covid-19. Sedangkan untuk kasus AIDS menurun di empat tahun terakhir karena perawatan terhadap HIV positif terus ditekankan dalam kondisi ARV (*Antiretroviral*).

Tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mencapai kelompok rentan seperti pekerja seks komersial, pengguna narkoba suntik, dan remaja, serta ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan yang memadai. ditambah lagi dengan adanya stigma masyarakat yang negatif terhadap odha menjadikan pemerintah sulit untuk merangkul odha dan memberikan layanan kesehatan yang dibutuhkan. Implementasi kebijakan di tingkat daerah memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, lembaga kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pencegahan penyebaran, penanganan kasus, dan dukungan kepada individu yang terinfeksi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk studi tentang penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Lamongan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data sekunder. Analisis data sekunder adalah proses analisis data yang menggunakan informasi yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan penelitian yang baru. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber seperti studi sebelumnya, laporan pemerintah, basis data kesehatan, atau dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Iswanto et al., 2024).

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang sudah ada, seperti dokumen Kabupaten Lamongan dalam angka tahun 2024, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 dan 2023,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dan penelitian terdahulu dan sumber lain yang relevan. Data sekunder akan dianalisis dengan cara merangkum temuan utama, menganalisis tren dan perubahan dari waktu ke waktu, serta mengevaluasi efektivitas intervensi yang sudah dilaksanakan.

Metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data sekunder ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal dan dinamika sosial dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas program dan layanan kesehatan masyarakat terkait HIV/AIDS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Lamongan akan dianalisis berdasarkan data dan informasi yang peneliti peroleh dan dianalisis berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS sebagai berikut:

Pelacakan

Pelacakan HIV/AIDS adalah proses yang mencakup berbagai langkah untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengelola penyebaran infeksi HIV serta memastikan pengobatan dan perawatan yang tepat bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pelacakan HIV/AIDS menghadapi berbagai tantangan yang menghambat upaya pencegahan dan pengobatan yang efektif. Stigma dan diskriminasi membuat banyak individu enggan menjalani tes HIV atau mencari perawatan karena takut akan penilaian negatif dari masyarakat. Kurangnya kesadaran dan edukasi mengenai HIV/AIDS di beberapa daerah juga menyebabkan rendahnya partisipasi dalam program pelacakan dan pencegahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Lamongan sebagai berikut

“Pelacakan ini lebih sulit karena sebagian orang menolak untuk dites. Sehingga persebarannya

tidak bisa dicegah. Padahal jika diketahui lebih dini mereka akan mendapatkan perawatan secepatnya” (Ahmad, 2020).

Dengan adanya masalah tersebut pemerintah kabupaten lamongan berinisiatif dengan menyediakan layanan *Mobile VCT*. *Mobile VCT* adalah kegiatan pencarian atau penemuan penderita HIV/AIDS secara *mobile*/keliling yang menasar ke sasaran kelompok beresiko. kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi sejak dini para penderita HIV/AIDS agar bisa mendapat perawatan atau memulai pengobatan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan cakupan panjaringan Tes HIV dan IMS tahun 2023 di wilayah kerja puskesmas Lamongan.

Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan mengenai HIV/AIDS adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat dalam pencegahan, deteksi, dan penanganan HIV/AIDS. Upaya ini melibatkan berbagai strategi dan kegiatan yang dirancang untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko, pencegahan, dan dukungan bagi mereka yang terinfeksi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2020, promosi kesehatan dapat diberikan dalam bentuk advokasi; bina suasana; pemberdayaan; kemitraan; dan peran serta masyarakat.

Sosialisasi yang telah dilakukan adalah dengan memperhatikan berbagai kelompok sasaran. Pertama, pada kelompok sasaran remaja pada usia 13-18 tahun, telah dilaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terkait pendidikan

kesehatan seksual, informasi tentang bagaimana HIV/AIDS dapat menyebar, serta cara-cara untuk mencegah penularannya. Selain itu, juga diberikan informasi mengenai pentingnya menjalani tes HIV secara berkala, serta bagaimana mengakses layanan kesehatan dan dukungan yang tersedia bagi mereka yang terkena dampak HIV/AIDS. Sosialisasi ini juga mencakup upaya untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS, serta mendorong perilaku hidup sehat.

Kedua adalah kelompok sasaran pekerja. Telah dilaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang khusus mengatasi risiko HIV/AIDS di kalangan pekerja industri. Selain itu, telah dilakukan edukasi pekerja mengenai tanda dan gejala HIV/AIDS, mempromosikan pentingnya menjalani tes HIV secara rutin, dan memberikan informasi tentang layanan kesehatan yang tersedia untuk diagnosis dan pengobatan. Materi juga berfokus pada mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, serta mendorong perilaku hidup sehat seperti penggunaan kondom dan praktik kebersihan diri.

Ketiga adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Program ini bertujuan untuk menyediakan sosialisasi dan penyuluhan tentang HIV/AIDS kepada WBP, dengan fokus pada edukasi tentang risiko penularan HIV/AIDS di dalam lingkungan pemasyarakatan, pentingnya tes HIV secara rutin, serta akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.

Tabel 1. Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Lamongan

No.	Kelompok Sasaran	Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Instansi Pelaksana
1.	Remaja	Penyuluhan dan sosialisasi bahaya dan pencegahan HIV AIDS	SMP/MTs; SMA/MA; SLB.	Puskesmas; Dinas Kesehatan
2.	Pekerja	Penguatan Budaya K3 terhadap program HIV/AIDS	PT BMI; PT. Kebun Tebu Mas	Disnakertrans Jatim; Disnaker Lamongan; RSUD Soegiri;
3.	WBP	Skrining dan Penyuluhan HIV Bagi WBP	Lembaga Pemasyarakatan	Kanwil Kemenkumham Jawa Timur

(Lapas) Kelas
II-B Lamongan

Sumber: Olahan Peneliti dari berbagai sumber (2024)

Pencegahan Penularan

Pencegahan penularan HIV/AIDS adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah penyebaran virus HIV dalam masyarakat. Pencegahan penularan ini memiliki tiga tujuan utama dalam konsep “*three zero*” diantaranya zero infeksi baru HIV/AIDS, zero kematian akibat HIV/AIDS, dan zero stigma/diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS (United Nations, 2021).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2020, pencegahan dilakukan dengan tiga sasaran utama yaitu pencegahan penularan melalui hubungan seksual; pencegahan penularan melalui hubungan non seksual; dan/atau pencegahan penularan dari ibu ke anaknya. Pencegahan penularan melalui hubungan seksual beresiko dapat dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi penggunaan alat pengaman seperti kondom, serta edukasi mengenai bahaya seks bebas dan strategi untuk mengurangi risiko penularan HIV/AIDS. Program ini juga memberikan informasi tentang pentingnya menjalani tes HIV secara berkala dan akses ke layanan kesehatan yang menyediakan dukungan yang dibutuhkan.

Kedua adalah pencegahan penularan melalui hubungan non seksual. Pencegahan melalui hubungan non seksual dapat ditekankan melalui sosialisasi tentang bahaya berbagi jarum atau alat suntik, edukasi mengenai cara-cara penularan melalui transfusi darah yang tidak aman, serta penggunaan alat-alat medis yang tidak steril. Ketiga adalah atau pencegahan penularan dari ibu ke anaknya. Di Kabupaten Lamongan pada 2022, terdapat satu (1) kasus HIV pada anak kurang dari empat tahun yang tertular dari ibunya (Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2022).

Pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke anaknya dapat dilakukan melalui program pemeriksaan dan pengobatan bagi ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS, termasuk pemberian terapi antiretroviral (ARV) kepada ibu selama kehamilan,

persalinan, dan menyusui untuk mengurangi risiko penularan virus kepada bayi. Selain itu, edukasi tentang manfaat tes HIV rutin bagi ibu hamil dan pilihan aman seperti penggunaan susu formula dapat membantu mengurangi kemungkinan penularan virus dari ibu ke anaknya.

Pelayanan

Pelayanan kesehatan untuk HIV/AIDS mencakup berbagai layanan yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan merawat infeksi HIV serta mendukung orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA). Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2020, pelayanan tes HIV dilaksanakan melalui skrining, surveilans HIV, dan diagnosis untuk memastikan pengelolaan kasus yang efektif dan tepat dalam upaya penanggulangan penyebaran virus HIV di wilayah tersebut.

Skrining dilakukan dengan Skrining dilakukan dengan menggunakan metode tes cepat atau rapid test untuk mendeteksi keberadaan antibodi HIV dalam darah atau cairan tubuh lainnya dengan cepat dan akurat. Metode ini penting untuk identifikasi dini kasus-kasus potensial yang memerlukan konfirmasi lebih lanjut melalui tes laboratorium yang lebih mendetail.

Surveilans HIV dilakukan dengan mengumpulkan data tentang kasus-kasus baru dan eksisting HIV/AIDS, menganalisis tren penularan, serta memantau karakteristik demografis dan perilaku yang terkait dengan penyebaran. data menunjukkan bahwa kasus HIV lebih banyak diderita oleh laki-laki, mencapai 56,41% dibandingkan dengan perempuan. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh mobilitas laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, meningkatkan risiko mereka untuk terinfeksi HIV (Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2022).

Diagnosis HIV adalah proses untuk menentukan apakah seseorang terinfeksi HIV, virus yang menyebabkan AIDS. Proses diagnosis dimulai dengan tes antibodi HIV, seperti tes cepat (rapid test) atau tes ELISA (*Enzyme-Linked Immunosorbent Assay*), yang mendeteksi

keberadaan antibodi HIV dalam darah atau cairan tubuh lainnya (Aryani et al., 2021). Jika hasil tes awal ini positif, tes konfirmasi seperti *Western Blot* atau *Immunofluorescence Assay (IFA)* dilakukan untuk memastikan hasil tersebut. Selain itu, tes viral load mengukur jumlah virus HIV dalam darah untuk menentukan tingkat infeksi dan memantau efektivitas pengobatan. Tes CD4 mengukur jumlah sel CD4 (sel T-helper) dalam darah, yang penting untuk menilai kekuatan sistem kekebalan tubuh dan tahap perkembangan penyakit. Tes genotipe resistensi juga bisa dilakukan untuk mengidentifikasi strain virus HIV dan menentukan apakah virus tersebut resisten terhadap obat antiretroviral tertentu, sehingga pengobatan dapat disesuaikan secara efektif. Diagnosis yang tepat dan dini sangat penting untuk memulai pengobatan antiretroviral sedini mungkin, yang dapat memperlambat perkembangan HIV menjadi AIDS, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi risiko penularan kepada orang lain.

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat penyandang ODHA dengan memberikan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV memiliki beberapa indikator kinerja yang penting untuk menilai efektivitasnya. Salah satu indikator utama adalah jumlah ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) yang terlayani sesuai standar, yang dalam periode ini tercatat sebanyak 18.933 orang. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini adalah sebesar 1.035.407.560 rupiah, namun realisasinya hanya mencapai 43,36%, yaitu 514.160.850 rupiah. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada sejumlah besar ODHA yang terlayani, penggunaan anggaran masih jauh dari yang direncanakan, dengan hanya sekitar setengah dari anggaran yang terealisasi. Hal ini dapat menunjukkan adanya tantangan dalam penyerapan anggaran atau dalam pelaksanaan program yang perlu dievaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan bagi ODHA.

Tabel 2. Program, indikator, anggaran dan realisasi pennanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Lamongan

<i>Program</i>	<i>indikator kinerja</i>	<i>ODHA</i>	<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi</i>	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	jumlah ODHA terlayani sesuai standar	18933 Orang	1,035,407,560	43.36%	514,160,850

Sumber: (Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2024)

Peran Masyarakat

Peran masyarakat dalam penanggulangan HIV/AIDS sangat penting dan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencegahan, penanganan, dan dukungan bagi ODHA. Peran masyarakat mencakup berbagai aspek. Masyarakat dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang akurat tentang HIV/AIDS, cara penularan, dan metode pencegahannya melalui program penyuluhan yang dilakukan oleh komunitas lokal, sekolah, dan organisasi masyarakat. Selain itu, masyarakat dapat menyediakan dukungan emosional dan psikologis bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA), membantu mereka menghadapi stigma dan diskriminasi, serta

mendorong mereka untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan.

Partisipasi aktif dalam program pencegahan, seperti distribusi kondom, kampanye kesadaran, dan inisiatif pengurangan risiko lainnya juga sangat penting, termasuk dalam program testing dan konseling untuk deteksi dini dan pengobatan. Selain itu, anggota masyarakat dapat berperan sebagai advokat untuk perubahan kebijakan yang mendukung penanggulangan HIV/AIDS dengan mendesak pemerintah meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, obat antiretroviral, dan program pencegahan. Pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA juga merupakan aspek penting, yang dapat dicapai melalui edukasi berkelanjutan dan kampanye anti-stigma untuk mengubah persepsi dan sikap negatif.

Masyarakat juga dapat mendukung ODHA melalui inisiatif pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja, membantu mereka tetap produktif dan mandiri, serta berkontribusi pada kualitas hidup mereka. Dengan peran aktif masyarakat dalam berbagai aspek ini, upaya penanggulangan HIV/AIDS dapat menjadi lebih efektif, komprehensif, dan berkelanjutan.

Informasi dan Pelaporan

Informasi dan pelaporan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS memainkan peran kunci dalam pengendalian dan pencegahan penyebaran virus. Pengumpulan data yang akurat dan sistematis mengenai kasus-kasus HIV/AIDS memungkinkan pemantauan tren epidemiologi dan penilaian efektivitas intervensi yang dilakukan. Melalui surveilans yang terus-menerus, informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok yang paling berisiko dan area geografis yang memerlukan perhatian khusus.

Pelaporan yang tepat waktu dan rinci oleh fasilitas kesehatan, laboratorium, dan organisasi masyarakat adalah dasar dari sistem surveilans yang efektif. Informasi ini mencakup data tentang jumlah kasus baru, prevalensi HIV, karakteristik demografis penderita, serta faktor-faktor risiko yang terkait. Selain itu, pelaporan juga mencakup informasi mengenai akses dan penggunaan layanan kesehatan, seperti tes HIV, terapi antiretroviral, dan layanan konseling.

Sistem informasi dan pelaporan yang baik juga memungkinkan deteksi dini wabah dan penyesuaian cepat terhadap strategi pencegahan dan pengobatan. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan, pihak berwenang dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan terarah, serta mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Lebih jauh, transparansi dalam pelaporan dan penyebaran informasi kepada publik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS. Kampanye edukasi berbasis data dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, mendorong perilaku pencegahan yang lebih baik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan HIV/AIDS. Secara keseluruhan, informasi dan pelaporan yang efektif adalah landasan dari

upaya penanggulangan HIV/AIDS yang sukses, memungkinkan respons yang lebih cepat, lebih terkoordinasi, dan lebih tepat sasaran dalam mengendalikan epidemi ini.

Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS merupakan elemen kunci untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang telah dirancang dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan. Pembinaan melibatkan berbagai aktivitas untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, lembaga masyarakat, dan individu dalam menangani HIV/AIDS. Ini termasuk pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis tentang diagnosa, pengobatan, dan manajemen kasus HIV/AIDS, serta peningkatan keterampilan dalam konseling dan dukungan psikososial bagi ODHA. Selain itu, pembinaan juga mencakup edukasi bagi masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang HIV/AIDS, cara penularan, dan metode pencegahan. Program-program edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye media, seminar, dan penyuluhan di komunitas-komunitas lokal.

Pengawasan adalah aspek penting lainnya yang memastikan bahwa program-program tersebut berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Ini melibatkan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan program, evaluasi efektivitas intervensi, serta identifikasi dan penyelesaian masalah yang muncul. Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan organisasi masyarakat. Pengawasan yang efektif membutuhkan sistem informasi yang andal untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data secara tepat waktu. Melalui pengawasan, pihak berwenang dapat mengidentifikasi tren epidemi, mengevaluasi keberhasilan program, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Pembinaan dan pengawasan yang terintegrasi memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif dalam upaya menanggulangi HIV/AIDS. Selain itu, kombinasi dari kedua aspek ini juga membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan

perawatan dan dukungan yang diperlukan untuk hidup sehat dan produktif.

Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS adalah komponen penting untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dapat diakses oleh semua yang membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Lamongan memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang bermutu dan terjangkau dalam menyelenggarakan layanan kesehatan sesuai kewenangannya.

Di Kabupaten Lamongan, sarana dan prasarana dalam penanggulangan HIV/AIDS terdiri dari berbagai jenis fasilitas kesehatan yang tersebar.

Tabel. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lamongan

No.	Jenis	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum	19
2	Rumah Sakit Khusus	2
3	Puskesmas	33

Sumber: (BPS Kabupaten Lamongan, 2024)

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat 19 rumah sakit umum dan 2 rumah sakit khusus yang menyediakan layanan medis umum sekaligus mendukung diagnosis dan pengobatan bagi ODHA. Selain itu juga terdapat Peskesmas yang tersebar di seluruh Kecamatan yang ada. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan sampai ditingkat Kecamatan. Sejak tahun 2019 jumlah Puskesmas di Kabupaten Lamongan sebanyak 33 Puskesmas yang terdiri dari 32 Puskesmas rawat inap dan 1 Puskesmas non rawat inap. Seluruh kecamatan juga dilayani oleh 33 Puskesmas yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan primer, menyediakan layanan tes HIV, konseling, dan edukasi pencegahan kepada masyarakat. Keberadaan fasilitas kesehatan ini mencerminkan komitmen Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi ODHA dan memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Lamongan telah

menunjukkan upaya yang signifikan dalam berbagai aspek, namun masih menghadapi beberapa tantangan. Pelacakan HIV/AIDS melalui Mobile VCT terbukti menjadi langkah efektif dalam menjangkau kelompok berisiko, meskipun hambatan berupa stigma, diskriminasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi kendala utama. Promosi kesehatan yang melibatkan berbagai kelompok sasaran, seperti remaja, pekerja, dan Warga Binaan Pemasyarakatan, telah dilaksanakan dengan baik, namun partisipasi dalam tes HIV secara berkala masih perlu ditingkatkan. Pencegahan penularan HIV/AIDS yang difokuskan pada hubungan seksual, non-seksual, serta penularan dari ibu ke anak menunjukkan langkah-langkah strategis dalam menekan penyebaran virus, meskipun masih ada kasus penularan dari ibu ke anak yang tercatat. Di sisi lain, pelayanan kesehatan bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kabupaten Lamongan telah mengalami kemajuan dengan dilakukannya skrining, surveilans, dan diagnosis yang lebih baik, namun realisasi anggaran yang belum optimal menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program. Peran serta masyarakat dalam program pencegahan dan pengurangan stigma menjadi faktor penting yang dapat mendukung keberhasilan upaya penanggulangan HIV/AIDS secara menyeluruh. Pelaporan yang tepat waktu dan transparansi informasi juga menjadi kunci dalam mengendalikan penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Lamongan.

REKOMENDASI

1. Meningkatkan Cakupan Pelacakan: Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu memperluas cakupan pelacakan melalui program Mobile VCT, serta melakukan pendekatan yang lebih inovatif untuk mengatasi stigma masyarakat terhadap tes HIV;
2. Peningkatan Promosi Kesehatan: Diperlukan kampanye yang lebih luas dan berkelanjutan, terutama melalui media sosial dan platform digital, untuk mengedukasi masyarakat tentang pencegahan HIV/AIDS dan pentingnya tes rutin;
3. Perbaikan Manajemen Anggaran: Pemerintah Kabupaten Lamongan harus meningkatkan

- efektivitas penyerapan anggaran untuk program HIV/AIDS, serta melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja pelaksanaan agar anggaran yang tersedia dapat direalisasikan sesuai target;
4. Penguatan Program Pencegahan Ibu-Anak: Pemeriksaan dan pengobatan HIV bagi ibu hamil perlu lebih diintensifkan, termasuk pemberian terapi ARV dan edukasi tentang pencegahan penularan kepada bayi;
 5. Penguatan Partisipasi Masyarakat: Peran aktif masyarakat dalam menyebarkan informasi, mendukung ODHA, dan mengurangi stigma harus terus didorong. Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat;
 6. Perbaiki Sistem Informasi dan Pelaporan: Sistem informasi yang lebih akurat dan real-time perlu dikembangkan untuk meningkatkan pemantauan kasus dan efektivitas pelaporan, serta mempermudah akses data bagi pengambil kebijakan; dan
 7. Pengawasan dan Pembinaan yang Lebih Intensif: Pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan kebijakan serta peningkatan pembinaan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat adalah kunci untuk memastikan program-program HIV/AIDS dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. (2020). *Virus HIV Jangkiti 138 Orang di Lamongan, 13 Meninggal Dunia*. Faktualnews. <https://faktualnews.co/2020/04/30/virus-hiv-jangkiti-138-orang-di-lamongan-13-meninggal-dunia/211236/>
- Aryani, A., Widiyono, W., & Suwarni, A. (2021). *Buku Mata Ajar Keperawatan HIV/AIDS*. Lima Aksara.
- BPS Kabupaten Lamongan. (2024). *Kabupaten Lamongan dalam Angka Tahun 2024*.
- Gunawan, I. W. A., Lubis, D., & SeriAni, L. (2021). Persepsi Remaja Terhadap Kontrol Perilaku Hiv Aids Di Wilayah Kerja Puskesmas Parigi Tahun 2021. *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(2), 344.
- Iswanto, D. (2023). Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 Dalam Perspektif Evidence Based Policy. *Jurnal Inovasi Daerah*, 2(2), 167–178. <https://doi.org/10.56655/jid.v2i2.134>
- Iswanto, D., Miskan, D. E. P. Z., & Solikha, W. S. (2024). *Public Sector Digital Transformation: Analysis of Digital Literacy of Government Apparatus in Kepatihan Village, Menganti District, Gresik Regency*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jpap.v10i2.11732>
- Muhammad, N. (2024). *Ada 16 Ribu Kasus AIDS Baru di Indonesia, Terbanyak di Jawa Barat*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ada-16-ribu-kasus-aids-baru-di-indonesia-terbanyak-di-jawa-barat>
- Pakpahan, M. (2021). *Promosi Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis.
- Pane, D. I. M., & Iskandar, I. S. (2023). Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dengan Penyakit Menular HIV/AIDS Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii A Binjai. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(3), 7–19.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026*.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2022). *Buku Profil Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2022*.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2024). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2024*.
- Rahman, F., Bahtiar, B., Permana, A. F., & Kurniawan, M. A. (2021). Factors Associated With Quality Of Life People Living With Hiv/Aids At Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Teman Sebaya (YPKDS) In Makassar City. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 10(1), 670–678.
- Riawati, D., Wahyuono, T., Hurairah, P., Kurniawan, Y., PR, V. A., Palupi, R. E. A., & Herbanu, P. S. (2024). Substansial Pemberian Edukasi Tentang Penyakit HIV/AIDS pada Remaja. *NGABDI: Scientific Journal of Community Services*, 2(1), 24–32.
- United Nations. (2021). *Global AIDS strategy 2021-2026: End inequalities. End AIDS*. UN: The United Nations.
- Widiyaningsih, D., & Suharyanta, D. (2020). *Promosi dan Advokasi Kesehatan*. Deepublish.